

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran penting dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat, sehingga kepercayaan dan rasa aman menjadi fondasi utama keberlangsungan operasional bank. Khususnya bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), kepercayaan sangat menentukan keberhasilan bank dalam menjaga stabilitas dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito. Sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, maka BPR harus meningkatkan kinerja keuangan serta kesehatannya dari waktu ke waktu. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka kepercayaan masyarakat kepada BPR sebagai lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana juga akan semakin tinggi.

Menabung di bank adalah salah satu upaya untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan dimasa mendatang, dalam perihal menabung yang diawali dengan niat dan keinginan, dengan adanya suatu perencanaan dan tujuan menabung. Hal ini dapat menentukan pemilihan bank sangatlah penting dengan mencari informasi bank yang sesuai dengan jenis tabungan apa yang dibutuhkan (Khasanah & Mustofa, 2022). Menurut Novianto & Nisa (2024), keputusan masyarakat untuk menggunakan produk perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh faktor psikologis. Persepsi keamanan berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap tingkat risiko serta kemampuan bank dalam melindungi dana dari penyalahgunaan, sedangkan kepercayaan mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap integritas, kejujuran, dan komitmen bank dalam mengelola dana mereka.

Dalam perspektif Islam, kepercayaan tersebut sejalan dengan konsep amanah yang menekankan tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola hak-hak pihak lain secara jujur dan profesional. Dana yang disimpan oleh masyarakat pada bank merupakan amanah yang harus dijaga keamanannya serta dikelola secara transparan dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga

perbankan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan nasabah. Dengan demikian, persepsi keamanan dan kepercayaan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menyimpan dana pada suatu bank (Zettira et al., 2026).

Semua lembaga jasa keuangan di Indonesia diatur serta diawasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdiri mulai tahun 2008 sebagai lembaga independen. OJK berwenang untuk menyetujui izin pendirian bank, mengambil keputusan tentang operasional bank, dan mengawasi kesehatan bank. Kehadiran OJK diharapkan dapat memungkinkan pengawasan bank yang lebih menyeluruh dan efisien. Pentingnya regulasi dan pengawasan perbankan oleh OJK tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan lembaga perbankan dapat beroperasi dengan baik, memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional (Azizah et al., 2025).

Dalam praktik operasionalnya, industri perbankan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama pada lembaga Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pada Oktober 2025, kinerja 18 BPR di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan laba yang mencapai Rp66,37 miliar, berbanding terbalik dengan kondisi pada Oktober tahun sebelumnya yang masih mencatat kerugian sebesar Rp35,49 miliar. Selain itu, total aset BPR juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,77%, yang mengindikasikan adanya pemulihan dan penguatan kinerja kelembagaan. Meskipun demikian, terjadi perlambatan pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta penurunan pada penyaluran kredit (<https://radarcirebon.disway.id>, 23 Februari 2026, pukul 13:00)

Tabel 1. 1
Daftar nama-nama BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon yang masih beroperasi

No	Nama BPR	Alamat
1.	PT. BPR Arthiasere	Jl. Gunung Ciremai Raya Blok A1 No.3 Kec. Harjamukti Kota Cirebon
2.	PT. BPR Baldah Sentosa	Jl. Raya Palimanan No.85 Kec. Palimanan Kab. Cirebon
3.	PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda)	Jl. Pangeran Cakra Buana, Kesambi, Kec. Talun Cirebon
4.	PT. BPR Cahaya Fajar	Jl. Karanggetas No. 142 Kec. Pekalipan Kota Cirebon
5.	PT. BPR Sahabat Sejati	Jl. Raya Klangeran No. 121 Kec. Klangeran Kab. Cirebon
6.	PT. BPR Sumber Sibapudung	Jl. Pramuka Puri Kalijaga Blok F Kavling 2-3 Kec. Harjamukti, Kota Cirebon
7.	PT. BPR Triastra Sejahtera	Jl. Dr. Sudarsono No. 274C, Kesambi Kota Cirebon
8.	Perumda BPR Kabupaten Cirebon	Jl. Raya Babakan Gebang No. 112 Kabupaten Cirebon

Sumber: *ojk.go.id*

Pada awal tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Peristiwa tersebut menambah panjang daftar BPR yang ditutup dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola serta fraud masih menjadi tantangan serius dalam industri BPR. Pencabutan izin dilakukan OJK sebagai bagian dari tindak pengawasan sekaligus memperkuat lembaga perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Hingga bulan kedua 2026, OJK tercatat telah menutup tiga BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, dan BPR Bank Cirebon (<https://finansial.bisnis.com>, 22 Februari 2026, pukul 15:00). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) utamanya masih disebabkan karena *fraud* dan manajemen yang buruk. OJK mencabut izin 27 BPR dan BPRS dari 2024-2025. Selain itu, proses

konsolidasi BPR/BPRS disebut masih berlangsung akan terus bertambah (<https://www.cnbcindonesia.com>, pada 22 Februari 2026, pukul 15:15).

Salah satu kasus yang terjadi adalah pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Kasus ini bermula dari ditemukannya permasalahan serius dalam tata kelola, integritas pengelolaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengawasan, namun tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan (<https://ojk.go.id>, 22 Februari 2026, pukul 14:00). Pada tahun yang sama, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon juga menetapkan kasus dugaan penyelewengan dana tabungan dan deposito nasabah yang terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2022 ke tahap penyidikan. Modus penyelewengan dilakukan dengan tidak menyetorkan dana nasabah yang diberikan kepada oknum tertentu ke dalam sistem bank (<https://www.cirebonbribin.com>, 22 Februari 2026, pukul 16:00). Akibat kegagalan dalam proses penyehatan, OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada tanggal 9 Februari 2026 (<https://ojk.go.id>, 22 Februari 2026, pukul 14:00).

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional Perumda BPR Bank Cirebon mengguncang kepercayaan publik. Sejumlah nasabah mengaku cemas terhadap keamanan dana simpanan mereka, bahkan isu tersebut mulai merembet hingga ke wilayah Kabupaten Cirebon (<https://radarcirebon.disway.id>, 23 Februari 2026, pukul 13:00). Tak butuh waktu lama, ratusan nasabah mendatangi kantor bank milik pemerintah daerah tersebut, khawatir dana simpanan mereka tak lagi bisa ditarik. Penutupan BPR Bank Cirebon menjadi peringatan keras bagi sektor perbankan daerah. Sebagai bank milik pemerintah daerah, BPR memiliki fungsi strategis dalam mendukung UMKM dan ekonomi lokal. Ketika bank daerah tumbang, dampaknya bukan hanya pada nasabah, tetapi juga pada kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengamat perbankan menilai transparansi dan komunikasi krisis menjadi faktor krusial untuk mencegah kepanikan meluas (<https://www.gakorpan.com>, 23 Februari 2026, pukul 15:14).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, secara nasional kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan peningkatan aset dan penghimpunan dana masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. DPK BPR pada Desember 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,37% (yoy) menjadi Rp151.516 triliun, meningkat dibandingkan Desember 2024 yang tumbuh 4,26% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada komponen deposito dan tabungan, yang masing-masing tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dan 6,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BPR di wilayah Cirebon tidak selalu menunjukkan pola yang sejalan dengan tren nasional. Berdasarkan data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, DPK pada beberapa BPR di Cirebon cenderung mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana di tingkat daerah belum sepenuhnya stabil.

Tabel 1. 2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di beberapa BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon Triwulan I Tahun 2024 - Triwulan I 2026

Bank	Tahun	Periode	Tabungan (Rp)	Deposito (Rp)	Total DPK (Rp)
Perumda BPR Kab. Cirebon	2024	Triwulan I	Rp218.946.403.224	Rp216.068.866.240	Rp435.015.269.464
		Triwulan II	Rp206.226.518.833	Rp185.884.682.516	Rp392.111.201.349
		Triwulan III	Rp225.473.980.732	Rp201.900.532.500	Rp427.374.513.232
		Triwulan IV	Rp260.153.524.652	Rp218.729.343.331	Rp478.882.867.983
	2025	Triwulan I	Rp242.653.890.587	Rp216.068.866.240	Rp458.722.756.827
		Triwulan II	Rp224.739.607.015	Rp212.957.951.660	Rp437.697.558.675
		Triwulan III	Rp244.885.153.010	Rp218.844.237.092	Rp463.729.390.102
		Triwulan IV	Rp288.253.302.370	Rp225.387.347.512	Rp513.640.649.882
	2026	Triwulan I	Rp269.093.272.770	Rp211.921.643.344	Rp481.014.916.114
PT. BPR Cahaya Fajar	2024	Triwulan I	Rp59.069.993.000	Rp352.773.346.000	Rp411.843.339.000
		Triwulan II	Rp62.325.860.076	Rp346.932.229.955	Rp409.258.090.031
		Triwulan III	Rp51.917.751.835	Rp358.935.143.866	Rp410.852.895.701

PT. BPR Cirebon Jabar		Triwulan IV	Rp42.564.671.387	Rp341.551.742.914	Rp384.116.414.301
	2025	Triwulan I	Rp41.955.992.000	Rp358.816.572.000	Rp400.772.564.000
		Triwulan II	Rp35.782.339.033	Rp346.932.229.955	Rp382.714.568.988
		Triwulan III	Rp41.883.772.002	Rp329.966.893.190	Rp371.850.665.192
		Triwulan IV	Rp40.326.655.276	Rp318.839.105.551	Rp359.165.760.827
	2026	Triwulan I	Rp34.169.679.940	Rp292.375.989.128	Rp326.545.669.068
	2024	Triwulan I	Rp220.238.024.255	Rp113.466.546.761	Rp333.704.571.016
		Triwulan II	Rp207.307.192.488	Rp111.244.649.834	Rp318.551.842.322
		Triwulan III	Rp223.718.886.446	Rp112.279.267.397	Rp335.998.153.843
		Triwulan IV	Rp250.750.510.485	Rp119.776.050.859	Rp370.526.561.344
	2025	Triwulan I	Rp234.820.360.921	Rp114.907.945.420	Rp349.728.306.341
		Triwulan II	Rp214.851.006.107	Rp107.360.965.835	Rp322.211.971.942
		Triwulan III	Rp234.417.839.781	Rp109.490.561.797	Rp343.908.401.578
		Triwulan IV	Rp272.971.401.675	Rp125.860.771.637	Rp398.832.173.312
	2026	Triwulan I	Rp243.679.162.772	Rp234.820.360.921	Rp478.499.523.693

Sumber: laporan triwulan BPR, BPR Cahaya Fajar, BPR Bank Jabar Cirebon

Jika dilihat secara lebih spesifik, seluruh BPR yang diamati menunjukkan penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode Triwulan IV 2025 ke Triwulan I 2026. Penurunan yang terjadi secara serentak ini menunjukkan adanya faktor eksternal yang memengaruhi perilaku nasabah, bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja masing-masing BPR. Kondisi tersebut bertepatan dengan mencuatnya kasus dan penutupan Perumda BPR Bank Cirebon yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Peristiwa ini dapat memicu penurunan persepsi keamanan, sehingga masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam menyimpan dana atau bahkan menarik simpanannya dari BPR. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada satu lembaga, tetapi juga memengaruhi BPR lain di wilayah Cirebon. Meskipun terdapat BPR yang sebelumnya menunjukkan kinerja stabil, tekanan terhadap kepercayaan masyarakat tetap tidak dapat dihindari karena persepsi keamanan menjadi faktor yang sensitif dalam keputusan menabung.

Penelitian terdahulu oleh Ashari & Nugrahanti (2021) menunjukkan bahwa *fraud* dan pelanggaran etika memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan Bank Perekonomian Rakyat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun BPR telah memahami pentingnya penerapan prinsip etika, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang tata kelola BPR. Pelanggaran etika terbukti menjadi faktor dominan penyebab kegagalan BPR sebesar 65%, yang menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat akibat lemahnya integritas dan tata kelola dapat mengancam keberlangsungan BPR.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mengungkapkan bahwa pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning bukanlah kejadian baru. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK telah beberapa kali mengambil langkah tegas tersebut, dan sebagian besar kasus disebabkan oleh *fraud* atau kecurangan internal. Kepala OJK Cirebon menjelaskan bahwa praktik *fraud* masih menjadi akar utama persoalan yang menjerat BPR hingga akhirnya harus ditutup. OJK telah menjalankan seluruh fungsi dan kewenangan secara optimal, mulai dari pembinaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Namun, kasus *fraud* yang terorganisasi dengan rapi di internal BPR kerap menyulitkan proses pengawasan. Tidak jarang, praktik kecurangan baru terungkap setelah pemeriksaan dan audit selesai, bahkan beberapa bulan atau tahun kemudian (<https://radarcirebon.disway.id>, 23 Februari 2026, pukul 13:00).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi dan kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap keputusan menabung. Penelitian pada Bank Jateng Syariah oleh Khasanah & Mustofa (2022) menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap bank berpengaruh positif terhadap minat dan keputusan menabung, sementara kepercayaan juga memberikan kontribusi terhadap perilaku menabung. Salah satu penelitian yang dilakukan di wilayah Solo Raya oleh Rahmawati & Sukardi (2024) juga menemukan bahwa kepercayaan nasabah secara signifikan memengaruhi minat menabung di bank syariah Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika

masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap bank, kemungkinan mereka untuk menabung meningkat.

Hasil kedua penelitian ini relevan dengan penelitian ini karena keduanya menegaskan pentingnya persepsi keamanan dan kepercayaan dalam memengaruhi keputusan masyarakat dalam menabung, meskipun konteks dan faktor yang dikaji berbeda karena umumnya dilakukan pada bank umum atau tanpa adanya latar belakang kasus pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon dengan latar belakang peristiwa pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon oleh OJK akibat kasus penyelewengan dana dan tata kelola bank yang tidak sehat. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk mengkaji sejauh mana persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat memengaruhi keputusan menabung setelah adanya kasus tersebut.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaruh persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon**. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pihak BPR dalam meningkatkan pengamanan dana dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi masalah terkait persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1. Terjadinya beberapa kasus penutupan BPR akibat *fraud* dan lemahnya tata kelola yang dapat memengaruhi citra dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BPR.
2. Penutupan Perumda BPR Bank Cirebon oleh Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kekhawatiran dan berpotensi memengaruhi persepsi keamanan masyarakat terhadap BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon.

3. Munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan simpanan meskipun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Adanya kemungkinan pengaruh persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon setelah terjadinya kasus pencabutan salah satu izin usaha BPR yang paling berpengaruh di Kota Cirebon.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, sehingga penelitian menjadi lebih terarah pada tujuannya. Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang sedang menabung di BPR di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.
2. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini hanya mencakup persepsi keamanan dan kepercayaan sebagai faktor yang memengaruhi keputusan menabung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah terkait persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh persepsi keamanan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh persepsi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat secara bersamaan terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh persepsi keamanan terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon.
- b. Menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon.
- c. Menganalisis pengaruh persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat secara bersamaan terhadap keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmiah di bidang perbankan, khususnya terkait persepsi keamanan, kepercayaan masyarakat, dan keputusan menabung pada Bank Perekonomian Rakyat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan aspek keamanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat guna mendorong keputusan menabung. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran keamanan dan kepercayaan dalam menentukan pilihan menabung. Selain itu, bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengawasan serta penyusunan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, kemudian diikuti dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai alasan penelitian dilakukan dan fokus yang ingin dicapai.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan persepsi keamanan, kepercayaan masyarakat, dan keputusan menabung. Selain itu, bab ini juga mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan metode yang digunakan peneliti, mulai dari pendekatan penelitian, lokasi dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis data yang digunakan, hingga cara menganalisis data. Bab ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data yang diperoleh dari responden, hasil pengolahan data, serta pembahasan mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana persepsi keamanan dan kepercayaan masyarakat berpengaruh dalam keputusan menabung pada BPR di Kota dan Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik masyarakat, pihak bank, maupun pihak lain yang berkepentingan. Bab ini juga memuat keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan bagi peneliti berikutnya.